

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GOGIK DI KABUPATEN SEMARANG

Nuno Inanda Nadhif, Ari Subowo, R. Slamet Santoso

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/>, email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui optimalisasi potensi lokal. Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang merupakan salah satu contoh desa yang potensinya tengah dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran berbagai *stakeholders* dalam proses pengembangan desa wisata tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. *Stakeholders* yang terlibat meliputi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Gogik, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sangat vital dalam menyediakan infrastruktur dasar dan regulasi yang mendukung pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa Gogik memiliki peran proaktif dalam mengedukasi masyarakat. BUMDes berperan sebagai penyusun program-program unggulan seperti peningkatan area wisata, peningkatan fasilitas dan peningkatan kualitas desa wisata. Pokdarwis berkontribusi dalam pengelolaan fasilitas dan pengorganisasian kegiatan wisata serta pemasaran desa wisata, sedangkan masyarakat lokal berperan sebagai pendukung dan memberikan kontribusi yang signifikan. Kolaborasi antara *stakeholders* ini menghasilkan berbagai dampak positif, seperti peningkatan ekonomi lokal, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar *stakeholders* yang belum optimal, dan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi dan kerjasama antar *stakeholders*, serta peningkatan partisipasi dengan penyelenggaraan program edukasi secara menyeluruh untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Gogik.

Kata Kunci : *Stakeholders*, Desa Wisata, Peran.

ABSTRACT

The development of tourist villages is an effective strategy to improve the welfare of local communities through optimizing local potential. Gogik Tourism Village in Semarang Regency is an example of a village whose potential is being developed. This research aims to analyze the role of various stakeholders in the development process of the tourist village. The methodology used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and documentation. The stakeholders involved include the Semarang Regency Tourism Office, Gogik Village Government, Village-Owned Enterprises (BUMDes), Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and local communities. The research results show that the role of the Semarang Regency Tourism Office is very vital in providing basic infrastructure and regulations that support the development of tourist villages. The Gogik Village Government has a proactive role in educating the community. BUMDes plays a role in preparing superior programs such as improving tourist areas, improving facilities and improving the quality of tourist villages. Pokdarwis contributes to managing facilities and organizing tourism activities as well as marketing tourist villages. Meanwhile, local communities act as supporters and provide significant contributions. This collaboration between stakeholders produces various positive impacts, such as improving the local economy, preserving culture and the environment, and increasing community capacity. However, the challenges faced include limited resources, inadequate coordination between stakeholders, and the gap between community expectations and reality on the ground. This research recommends increasing communication and cooperation between stakeholders, as well as increasing participation by implementing a comprehensive educational program for the sustainable development of the Gogik Tourist Village.

Keywords: Stakeholders, Tourism Village, Role.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki peran penting bagi negara, terutama dalam meningkatkan devisa negara dan sektor lainnya. Kondisi industri pariwisata saat ini sedang mengalami perkembangan pesat sehingga pemerintah dan masyarakat sama-sama berusaha untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sebagai upaya untuk mendukung perkembangan pariwisata. Hal ini karena industri pariwisata mampu memberikan dampak positif bagi sektor-sektor lain, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara sangat berpengaruh pada pendapatan devisa negara. Pada 2021, kunjungan wisatawan domestik mencapai 603 juta, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 1,5 juta. Pada 2022, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 5,4 juta. Peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh

karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan industri pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi negara.

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata yang sangat menonjol serta potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Tingginya wisatawan di Jawa Tengah secara tidak langsung mendorong berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan sektor pariwisata, berikut akan disajikan kabupaten/kota dengan wisatawan terbanyak di Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Kabupaten dengan Jumlah Wisatawan Terbanyak di Jawa Tengah Tahun 2022

Kabupaten	Wisatawan
Kabupaten Klaten	3.303.423
Kabupaten Magelang	1.889.177
Kabupaten Banyumas	1.795.352
Kabupaten Semarang	1.746.076
Kabupaten Purbalingga	1.695.084

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 yang menyajikan kabupaten/kota dengan wisatawan terbanyak di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan bahwa kabupaten Semarang termasuk dalam lima besar dengan jumlah kunjungan sebanyak 1,746,076 wisatawan. Pada peringkat kedua terdapat Kabupaten Magelang dengan jumlah kunjungan sebanyak 1,889,177 wisatawan, sedangkan kunjungan terbesar ada di Kabupaten Klaten sebanyak 3,303,423 wisatawan.

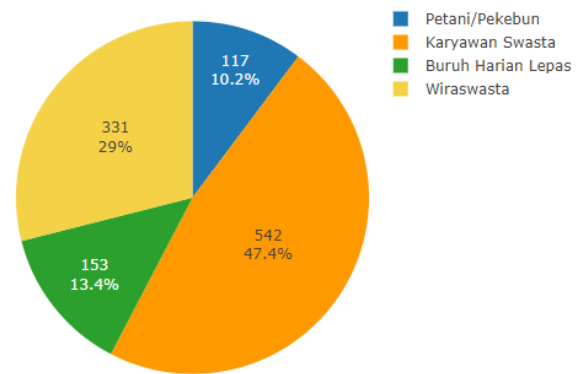
Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah wisatawan terbanyak di Jawa Tengah. Sektor pariwisata di Kabupaten Semarang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dengan slogannya sebagai INTANPARI yang menggabungkan Industri Pertanian dan Pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang untuk periode 2010 – 2030.

Saat ini, minat wisatawan mulai bergeser dari sekadar menikmati keindahan alam menuju pengalaman wisata yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Kabupaten Semarang saat ini memiliki 70 desa wisata, menjadikannya kabupaten dengan jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia. Salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang adalah Desa Gogik, yang terdiri dari dua dusun: Dusun Gogik dan Dusun Gintungan.

Pengembangan Desa Wisata Gogik menghadapi tantangan yang signifikan, yaitu kurangnya sinergi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik dalam hal pembinaan dan pelatihan. Untuk mengembangkan desa wisata secara efektif, sangat penting adanya pembinaan dan pelatihan yang optimal. Ketidaksinergian peran antara Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik dapat memengaruhi terhadap pembangunan pengembangan Desa Wisata Gogik. Dalam hal ini, pembangunan fasilitas pengembangan Desa Wisata Gogik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dapat dikatakan

belum optimal. Beberapa faktor yang mendukung penilaian ini termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan aksesibilitas, dan minimnya promosi wisata yang dilakukan.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk memberdayakan mereka agar serta dalam pengelolaan Desa Wisata Gogik dengan standar yang memadai. Namun, masih terdapat kendala dalam peran yang dimainkan oleh Kelurahan Gogik, BUMDEs dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata Gogik yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.3 yang menunjukkan jenis pekerjaan masyarakat Desa Gogik sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Jenis Pekerjaan di Desa Gogik

Sumber : Data Pemerintah Desa Gogik, 2024 (diolah)

Dapat dilihat melalui Gambar 1.3 bahwa profesi terbanyak masyarakat Desa Gogik sebesar 47,4% adalah karyawan swasta. Dilihat dari persentase profesi karyawan swasta, hal tersebut juga menjadi dasar akibat masyarakat tidak terlalu berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata gogik. Kurangnya partisipasi masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pariwisata. Masyarakat Desa Gogik melihat bahwa keuntungan yang didapat dari pengembangan desa wisata itu tidak pasti sehingga mereka lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan yang sudah pasti menghasilkan.

Pengembangan Desa Wisata Gogik pada dasarnya harus diimbangi dengan promosi pariwisata. Sejauh ini pemanfaatan teknologi sebagai alternatif media promosi Desa Wisata Gogik belum berjalan secara optimal sehingga pengunjung kesulitan dalam mencari informasi Desa Gogik. Promosi Desa Wisata Gogik tergolong rendah jika dibandingkan dengan desa wisata lain yang ada di Kabupaten Semarang yang gencar melakukan promosi melalui *website* dan akun media sosial. Dalam hal ini meskipun proses promosi sepenuhnya dari pemerintah, seharusnya pihak Pokdarwis Desa Gogik harus tetap gencar dalam melakukan promosi pariwisata Desa Wisata Gogik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang”.

B. TUJUAN PENELITIAN

Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa

Wisata Gogik di Kabupaten Semarang, memahami peran masing-masing, serta penghambat dalam keterlibatan mereka.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mana peneliti berusaha menganalisis fenomena-fenomena secara lebih mendalam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi *Stakeholders*

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga klasifikasi *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Gogik, yaitu *stakeholders* kunci, *stakeholders* primer, dan *stakeholders* sekunder.

1. *Stakeholders* Kunci

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang mempunyai wewenang yang memengaruhi pengembangan Desa Wisata Gogik dan dapat dikatakan sebagai *stakeholders* kunci. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan, memberikan dukungan promosi, dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan

wisata. Dinas Pariwisata dapat mempengaruhi kualitas dan daya tarik desa wisata melalui program-program budaya dan pariwisata yang telah ditetapkan.

2. *Stakeholders* Primer

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi berperan sebagai *stakeholders* primer dalam pengembangan Desa Wisata Gogik. Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, terlihat bahwa Desa Wisata Gogik dikelola oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi. Mereka memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan lapangan serta terpengaruh secara langsung oleh dampak negatif atau positif yang terjadi.

3. *Stakeholders* Sekunder

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mempunyai keterlibatan dalam pengembangan Desa Wisata Gogik. Keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu turut

memberikan bantuan keuangan dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan desa wisata. Dengan adanya dukungan dari beberapa pihak, Pemerintah Desa Gogik dapat menciptakan kerjasama yang memiliki suasana yang dapat memacu partisipasi komunitas, meningkatkan pembangunan fasilitas, dan menguatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik. Selain itu, masyarakat Desa Gogik juga turut andil membantu mengembangkan Desa Wisata Gogik sebagai pedagang maupun pekerja. Adanya desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peran *Stakeholders*

Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima peran yang dimiliki *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Gogik, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1. *Policy Creator*

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang memegang peran strategis sebagai bagian

integral dari struktur pemerintahan dalam mendukung bupati terkait pariwisata di Kabupaten Semarang. Sesuai dengan peraturan dan tanggung jawabnya, Dispar Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan (*policy creator*) dalam merencanakan pengembangan desa wisata, termasuk Desa Wisata Gogik.

2. Koordinator

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang berperan aktif sebagai koordinator dalam upaya pengembangan Desa Wisata Gogik. Dispar Kabupaten Semarang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk membentuk forum diskusi mengenai desa wisata di Kabupaten Semarang. Selain itu, Dispar juga memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Gogik secara menyeluruh.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo berperan

sebagai koordinator yang secara konsisten berkoordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi. BUMDes Rejomulyo membantu menjembatani koordinasi antara Pokdarwis Lohjinawi dengan kelompok masyarakat lokal yang terdapat di Desa Wisata Gogik. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi dalam pengembangan desa wisata Gogik juga memiliki peran yang sangat signifikan karena lembaga ini menjadi wakil utama dari masyarakat lokal dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa.

3. Fasilitator

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang aktif mendukung pengelola desa wisata untuk mengoptimalkan potensi desa, menarik lebih banyak pengunjung, dan meningkatkan pengalaman wisata. Dispar mengadakan sesi berbagi pengalaman dan diskusi kelompok untuk mempelajari praktik terbaik, strategi pemasaran, dan inovasi layanan. Dispar juga memberikan bimbingan teknis

untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, mendukung keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal, serta meningkatkan daya saing desa wisata. Selain itu, Dispar mempromosikan desa wisata melalui media sosial dan aplikasi "APIKS", membantu pembuatan materi promosi, serta mengadakan pameran pariwisata dan kampanye media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menarik wisatawan.

Pemerintah desa berperan vital sebagai fasilitator dalam pengembangan desa wisata, termasuk perencanaan strategis melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan pembentukan kelompok kerja wisata. Mereka juga bertanggung jawab dalam penggalangan sumber daya dan pelatihan keterampilan warga, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wisata. Namun, kendala utama adalah kurangnya anggaran.

BUMDes Rejomulyo menghubungkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan kelompok masyarakat lain seperti

petani, seniman, dan pengrajin untuk menciptakan sinergi pengembangan produk wisata. Namun, BUMDes sering kali menghadapi kendala anggaran, terutama dalam perekrutan tenaga ahli untuk bantuan teknis, yang menghambat strategi pengembangan yang efektif.

4. Implementor

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang memiliki peran signifikan sebagai implementer dalam pengembangan desa wisata Gogik. Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan visi dan rencana pengembangan desa wisata yang telah dirumuskan.

BUMDes berperan sebagai penghubung antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan komunitas lokal seperti petani, peternak, dan UMKM dalam pengembangan desa wisata. Mereka memetakan potensi wisata seperti Embung Sukoponco, mengelola dana bantuan, dan membangun fasilitas pendukung. Meski berkontribusi besar, BUMDes menghadapi kendala

kurangnya aktivitas Pokdarwis dan SDM yang paham SOP pelayanan dan administrasi.

Pokdarwis Lohjinawi bertanggung jawab memelihara fasilitas dan mengorganisir kegiatan wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, serta berkoordinasi dengan kelompok lokal untuk mendukung ekonomi desa. Namun, kesibukan anggota Pokdarwis menghambat partisipasi optimal, memaksa BUMDes mengambil alih banyak tanggung jawab, yang dapat mengurangi sinergi dan kualitas layanan.

5. Akselerator

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Masyarakat Desa Gogik memegang peranan krusial dalam akselerasi pengembangan Desa Wisata Gogik. Pokdarwis bertanggung jawab atas pengelolaan destinasi secara langsung, termasuk pemeliharaan fasilitas seperti jalur trek, taman, dan pengaturan acara budaya lokal. Kehadiran Pokdarwis yang konstan di lapangan memastikan bahwa segala fasilitas terpelihara

dengan baik dan siap menyambut pengunjung, sehingga menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan, sedangkan keterlibatan masyarakat lokal dilakukan dengan membuka usaha dagang, menyediakan *homestay*, dan berperan sebagai pekerja dalam berbagai kegiatan wisata.

Faktor Penghambat

1. Nilai

Faktor nilai merupakan faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi dan Masyarakat Desa Gogik masih kurang aktif dalam pengembangan Desa Wisata Gogik. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan lunak dalam administrasi keuangan dan pemahaman tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani tamu.

2. Komunikasi

Terdapat hambatan berupa ketidaksesuaian pemahaman antar *stakeholders*. Perspektif yang beragam dari pemilik usaha lokal, masyarakat setempat, dan

pemerintah daerah memperumit situasi karena setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah yang seharusnya diambil dalam pengembangan wisata tersebut. Selain itu, sebagian masyarakat Desa Gogik masih kurang sadar akan pentingnya saling menghargai dan mendukung antar *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata. Mereka lebih suka menghakimi daripada memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan.

3. Kepercayaan

Terdapat sejumlah masalah yang berkaitan dengan kurangnya rasa kepercayaan. Kepercayaan Dinas Pariwisata terhadap para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik belakangan ini mulai berkurang. Salah satu penyebab utama penurunan kepercayaan ini adalah tidak adanya laporan mengenai perkembangan desa wisata, yang mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak tersebut. Selain itu, beberapa anggota masyarakat atau *stakeholder* mungkin tidak

sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung inisiatif ini karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama adalah ketidakpastian mengenai manfaat yang akan mereka peroleh dari pengembangan desa wisata.

E. KESIMPULAN

Stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Gogik diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *stakeholders* kunci, *stakeholders* primer, dan *stakeholders* sekunder, adapun klasifikasinya sebagai berikut :

- a. *Stakeholders* Kunci : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang.
- b. *Stakeholders* Primer : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi.
- c. *Stakeholders* Sekunder : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Desa Gogik, dan masyarakat Desa Wisata Gogik.

Peran *Stakeholders* diklasifikasikan menjadi lima, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

- a. *Policy Creator* : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang, dan Pemerintah Desa Gogik berperan sebagai pembuat kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan dan pengembangan desa wisata.
- b. Koordinator : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi memiliki peran sebagai koordinator dalam proses pengembangan desa wisata.
- c. Fasilitator : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Gogik memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pengembangan desa wisata, namun terdapat permasalahan kurangnya anggaran untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa wisata.
- d. Implementer : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi memiliki peran sebagai implementer dalam proses pengembangan desa wisata, namun terdapat permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada BUMDes yang kompeten dan kurang aktifnya anggota Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata.
- e. Akselerator : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi dan Masyarakat Desa Gogik memiliki peran sebagai akselerator dalam proses pengembangan desa wisata, namun terdapat permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik akibat perbedaan perspektif di kalangan warga.

Faktor penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang adalah faktor nilai, faktor komunikasi, dan faktor kepercayaan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti membuat saran dalam upaya pengembangan Desa Wisata Gogik sebagai berikut :

1. Perlunya penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan khusus untuk anggota Pokdarwis agar mereka dapat lebih memahami manfaat serta peran mereka dalam mengembangkan Desa Wisata Gogik.
2. Perlunya menjalin kemitraan dengan sektor swasta, LSM, organisasi nirlaba, dan masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis dalam pengembangan desa wisata.
3. Diperlukan adanya program edukasi yang menyeluruh seperti *workshop* atau seminar tentang manfaat pariwisata bagi pembangunan desa, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
4. Perlunya penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan keterampilan secara teratur bagi anggota BUMDes, dengan fokus pada aspek administrasi, manajemen, dan pelayanan pelanggan pariwisata
5. Pokdarwis perlu menyusun jadwal atau agenda yang jelas dan fleksibel untuk kegiatan dan pertemuan agar anggota dapat mengatur waktu mereka secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). Dasar Kebijakan Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Arafat, S. Y., Priyadi, B. P., & Rahman, .Amni Zakarsyi. (2022). Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34696%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/34696/27295>
- Artha Ayu Purnama, A. O. D. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Bahari Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*.
<https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.84>
- Asyifa, N., & Suhirman, S. (2023). Peran Stakeholder terhadap Pengembangan Destinasi Ekowisata Mangrove Siak. *Warta Pariwisata*.
<https://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.1.04>
- Badan Pusat Statistik, J. T. (2022). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022 Jawa Tengah. 2021.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIIS: Jurnal*

- Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia.*
<https://doi.org/10.31842/journalinobis.v4i2.179>
- BPS Kabupaten Semarang 2023. (2023). Kabupaten Semarang Dalam Angka 2023. *Kabupaten Semarang Dalam Angka.*
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2023). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.*
- Bryson, J. M. (2004). What To Do When Stakeholders Matter. *Public Management Review.*
<https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Bullah, H., & Rimawati, Y. (2021). Inovasi Geomembran dan Peran Stakeholders pada Usaha Tambak Garam Rakyat. *InFestasi.*
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10027>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.*
- Destiana, R., Yuningsih, T., Imam, J., Sh, B., Semarang, N., Aksi, R., & Penyengat, P. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 08(02), 132–153.
- DPR-RI. (2009). Undang-Undang Kepariwisata no 10 tahun 2009. *Dpr.Go.Id.*
- DPRD. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. <https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/>, 8(5), 55.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press.*
- Febrianti, E., & Eprilianto, D. (2023). Analisis Peran Stakeholders Daerah dalam Pengembangan City Branding “Lamongan Megilan.” *Publika.*
<https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1849-1862>
- Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *PERSPEKTIF.*
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5225>
- Gubernur-JawaTengah. (2019). Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 2020(1), 473–484.
- Hanafie, R. (2016). Ilmu Sosial Budaya Dasar. *Yogyakarta: Andi 2017.*
- Handayani, T. S. (2014). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Persediaan Obat Pada Pos Kesehatan Desa Wonoanti. *Journal, Speed Engineering, Sentra Penelitian.*
- Hasdiana, U. (2018). Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, September, 63.
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2019.v06.i01.p04>
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah*

- Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51.
- Hidayah, A. N., Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2019). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Objek Pariwisata Alam dan Sejarah di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*.
<https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2179>
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu. In *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*.
- Lofland, L. H. (2006). From J. Lofland, D. Snow, L. Anderson & L.H. Lofland (2006). *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. (4th Ed.) Belmont, CA: Wadsworth Thomson. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (4th Ed.)*.
- Maryono. (2005). Identification of factors affecting stakeholders' intentions to promote preparedness in disaster waste management: A structural equation modeling approach. *Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University*.
- Masyhurah, Yuningsih, T., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.56>
- Muljadi. (2016). *Kepariwisata dan Perjalanan. Rajawali Pers. Jakarta. Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*.
- Novanda, S. Y. (2019). *Peran Aktor dalam Pengelolaan Goa Jlamprong Sebagai Daya Tarik Desa Wisata Mojo di Ngeposari Semanu Gunungkidul*. 1–12.
- Nugroho, A. Y. (2022). *Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Oktaviarni, R., Yumarni, T., & Anggraeni, N. L. V. (2023). Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Penta Helix di Desa Jambu. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Paristha, N. P. T., Arida, I. N. S., & Bhaskara, G. I. (2022). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8, 625.
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p13>
- Pasolong, H. (2015). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung. In *Alfabeta*.
- Perbawasari, S., Dida, S., & Nugraha, A. R. (2019). Peran Stakeholders dalam Membangun Identitas Purwakarta yang Berwawasan Nilai Budaya Lokal. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.24198/prh.v4i1.21349>
- Purba, G. P., Yuningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2012). Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulisyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*.
- Rohmania, K., Juni, S., & Astuti, W. (2022). Analisis Peran Aktor Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, 1(1), 69.
- Rosa, S. A. S., Irawati, I., Saefullah, D., & Myrna, R. (2020a). *Partnership Dalam*

- Produktivitas Publikasi Hasil Penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.31506/jap.v11i1.7976>
- Rosa, S. A. S., Irawati, I., Saefullah, D., & Myrna, R. (2020b). Partnership Dalam Produktivitas Publikasi Hasil Penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.31506/jap.v11i1.7976>
- Saputra, P. P., Hayati, L., & Bahtera, N. I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Based Tourism dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i1.92>
- Semarang, B. P. S. K. (2021). Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*.
- Simanjorang, F., Hakim, L., & Sunarti, S. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir. *Profit*, 14(01), 42–52. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.01.5>
- Statistik, B. P. (2021). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R & D) Alfabeta. Bandung. *Metode Penelitian Bisnis*.
- Talib, D. (2021). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*. <https://doi.org/10.31314/tulip.3.1.12-18.2020>
- Yuwono, C., & Dwijanto, D. (2019). IBM Pengembangan Desa Wisata Gogik Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Rekayasa*. <https://doi.org/10.15294/rekayasa.v16i2.17512>